

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Analysis of Empowerment Fisherman Community in Tobelo, North Halmahera

Michel Sipahelut¹, Budy Wiryawan², Tri Wiji Nurani²

Abstract

The objectives this research were 1) to assess the implication PEMP program on the performance of technology, social, economic and institutional development of coastal communities, 2) to determine the improvement strategy of empowerment of coastal communities in research sites, 3) to provide improvement strategy for coastal communities in research sites. Research was using survey method, with research subjects were 30 samples of coastal communities in Tobelo, five samples LEPP-M3 and five samples of Marine and Fishery Department of North Halmahera Regency. Result of this research showed that, implementation PEMP program has triggered changes in social-cultural, technological, economic and institutional development of coastal communities in North Halmahera Regency. Results of internal and external evaluation showed that 1) their strengths were: enough available labor, potency age, adequate level of education dan strongh motivation; 2) their opportunities were: potential of fish resources, employment opportunities in the field of fisheries, cooperatives LEPP-M3 and local government support; 3) their weakness were: lack of technological, lack of capital, limited market access, and limited support facilities fishing effort; dan (4) their theats were: low fish prices, high fuel prices, bed weather or season causing them doesn't operating; dan Illegal fishing. Priority alternative repair model empowerment for coastal community in North Halmahera Regency were 1) development of capital access; 2) development of technology and scale fisheries; 3) development of market access; 4) capacity development of coastal community institutional; 5) community base management of fisheries and (6) development of support facilities fishing effort; and development of fishes processing diversification.

Keywords: coastal community, PEMP program, model of coastal communities empowerment in research sites.

¹ Mahasiswa program magister sains Mayor Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap, Sekolah Pascasarjana IPB

² Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan yang kaya akan sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagian besar penduduknya bermukim di wilayah pesisir dan kehidupannya tergantung dari sumberdaya perikanan. Realitanya, sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dault (2008), menyatakan karena begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut kelompok miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*). Oleh karena itu, agar mereka bisa keluar dari belenggu kemiskinan perlu ada intervensi (dorongan dari luar) untuk memberdayakan mereka melalui program-program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir.

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang merupakan program pemerintah pusat dan dikembangkan secara nasional. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Program ini telah dimplementasikan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2004, 2006 hingga 2008. Berbagai kemajuan telah dicapai dari program tersebut. Setelah program ini berjalan beberapa tahun, tentunya perlu dievaluasi sejauhmana program ini dapat menjawab permasalahan masyarakat pesisir. Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat menarik untuk mengkaji dampak program PEMP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

Wilayah penerima program PEMP tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu kecamatan penerima bantuan adalah Kecamatan Tobelo, yang menjadi focus daerah penerima program PEMP yang akan dievaluasi dalam penelitian ini. Dasar pertimbangan Kecamatan Tobelo sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Tobelo merupakan pusat pendaratan utama armada perikanan skala kecil yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara.

- 2) Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara sebagai lembaga pengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) PEMP terletak di Kecamatan Tobelo.
- 3) Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan program PEMP pada tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008. Pelaksanaan program PEMP, khususnya di Kecamatan Tobelo sudah berjalan dalam waktu cukup lama, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak program PEMP terhadap kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan program.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan teknologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo.
- 2) Merumuskan dan menentukan strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa pesisir penerima PEMP di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Jangka waktu penelitian dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 (sepuluh bulan) mulai dari pembuatan proposal hingga penulisan tesis.

2.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus (Arikunto 2000). Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden penerima program dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, data/informasi dari berbagai sumber seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, Kantor Statistik Kabupaten Halmahera Utara dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang menjadi anggota Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di Kecamatan Tobelo dan *stakeholder* perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Sampel responden diambil dengan menggunakan *random purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu secara acak (Sugiyono, 2006). Pengambilan responden terdiri dari KMP nelayan sebanyak 18 orang, KMP pembudidaya ikan sebanyak 2 orang, KMP pedagang ikan sebanyak 10 orang, Koperasi LEPP-M3 sebanyak 5 orang dan 5 orang perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

2.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan, yaitu 1) analisis deskriptif, untuk menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan sistem usaha perikanan di lokasi penelitian; 2) analisis *wilcoxon signed rank test* (Lind, Marchal dan Wethen, 2007), untuk mengkaji dampak program PEMP terhadap pendapatan responden; 3) analisis SWOT (Rangkuti, 2002), untuk merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian; dan 4) proses hierarki analitik (PHA) (Nurani dalam Departemen PSP 2003), untuk menentukan alternatif kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

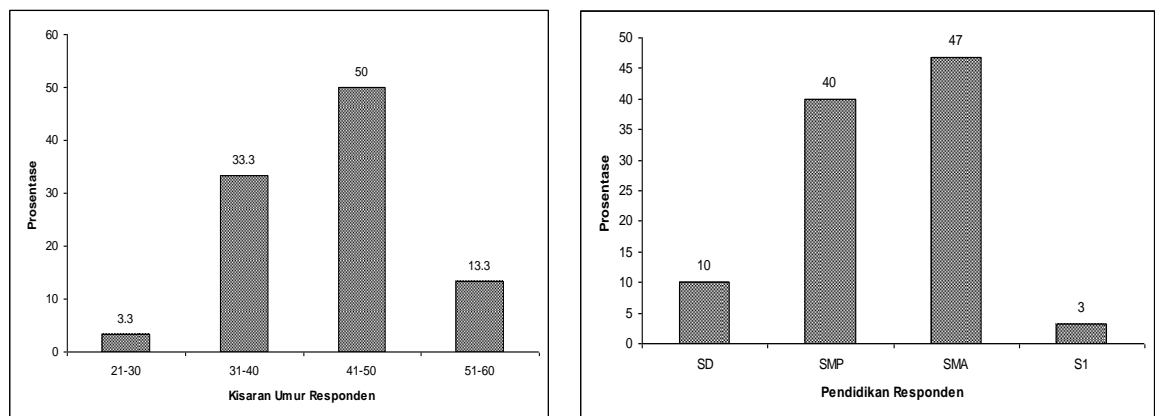
3.1 Implikasi Program PEMP terhadap Sistem Usaha Perikanan

3.1.1 Implikasi terhadap sosial budaya perikanan

Kondisi umum sosial budaya masyarakat pesisir dijelaskan melalui pendekatan karakteristik responden, yaitu meliputi kondisi sosial-budaya, umur, pendidikan, pengalaman kerja, jumlah tanggungan keluarga, dan waktu kerja dalam satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PEMP telah memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan di masyarakat pesisir Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan penting aspek sosial budaya masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo adalah menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, yaitu: nilai kejujuran, keterbukaan, dan

gotong royong. Nilai-nilai lokal masyarakat pesisir tersebut diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi LEPP-M3. Pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian terhadap pengembangan usaha meraka dan pegelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Hasil analisis terhadap variabel umur menunjukkan hampir 50% responden berumur antara 41-50 tahun, berumur 31-40 tahun sebanyak 33,3%, dan sisanya 16,6% berumur 21-30 dan 51-60 tahun (Gambar 1A). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo berusia dibawah 50 tahun dan merupakan usia potensial untuk menjalankan suatu usaha. Untuk pendidikan sebagian besar responden lulus SMA (47%) dan lulus SMP (40%) yang merupakan modal bagi pengembangan usaha meraka. (Gambar 1b).



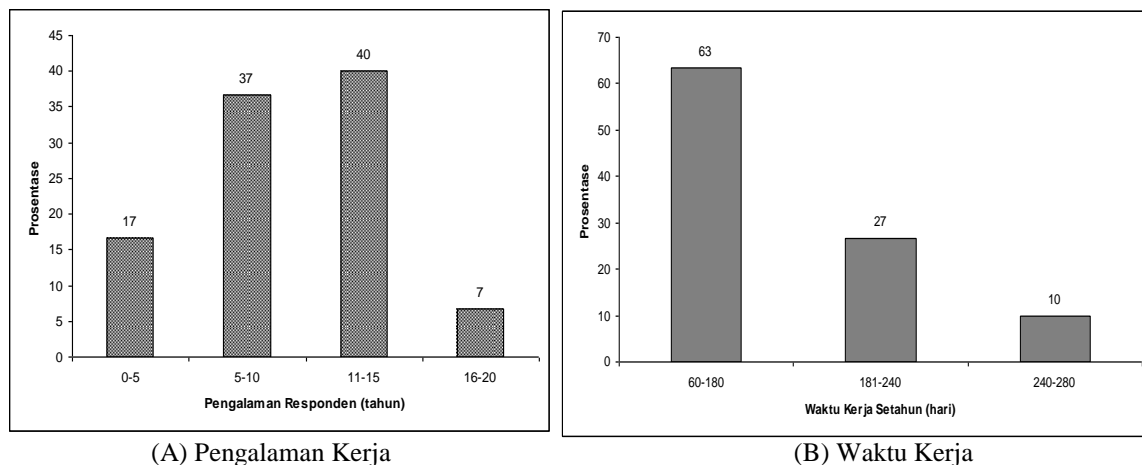
(a) Umur

(b) Pendidikan

Gambar 1 Sebaran umur dan tingkat pendidikan responden PEMP di Kecamatan Tobelo

Pengalaman kerja responden mayoritas antara 11-15 tahun sebanyak 40% dan antara 5-10 tahun sebanyak 37% (Gambar 2A). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah berpengalaman dalam menggeluti usahanya. Sedangkan waktu kerja dalam setahun 63% responden bekerja antara 60-180 hari/tahun, 27% responden antara 181-240 hari/tahun dan 10% responden antara 240-280 hari/tahun (Gambar 2B). Hal ini menunjukkan waktu kerja responden masyarakat pesisir tidak dapat penuh sepanjang tahun. Kondisi ini disebabkan usaha

perikanan skala kecil sangat dipengaruhi musim. Dalam setahun operasi penangkapan ikan hanya dapat beroperasi 8 bulan dan sisanya 4 bulan nelayan tidak melaut, karena pada bulan November sampai Februari sering terjadi badai dan gelombang besar. Apabila nelayan tidak melaut menyebabkan kegiatan pedagang ikan juga ikut berhenti bekerja. Pada kondisi ini, mereka akan melakukan pekerjaan sampingan sebagai ojek beca, buruh pelabuhan dan bertani/berkebun.



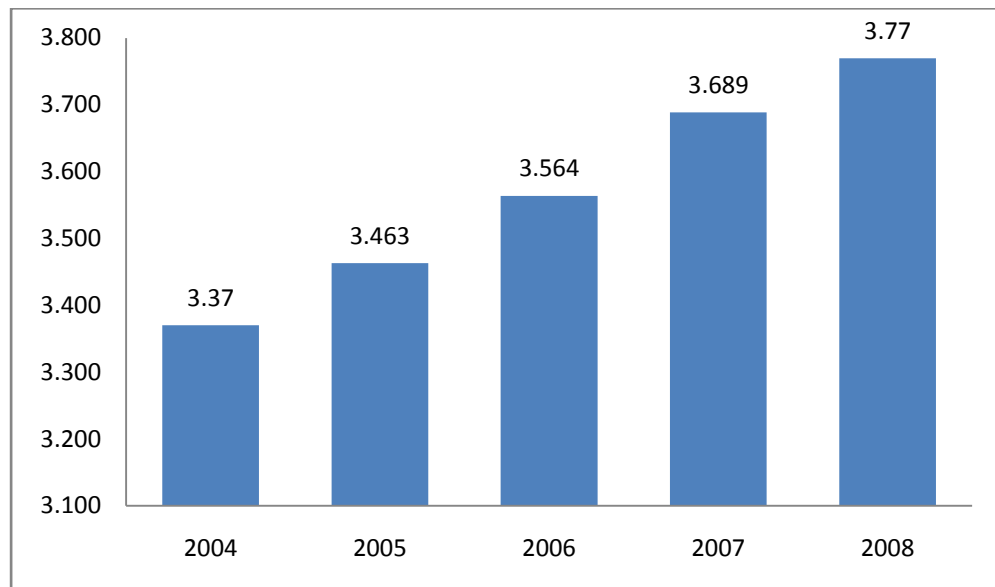
Gambar 2 Pengalaman dan waktu kerja responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara

3.1.2 Pengembangan teknologi usaha perikanan

Program PEMP telah mendorong pengembangan teknologi usaha perikanan yaitu dari pancing ulur menjadi *gillnet*, motorisasi perahu (ketinting), pengembangan unit penangkapan pajeko (*mini purse seine*) serta pengembangan budidaya ikan. Implikasi pengembangan teknologi adalah perbaikan kapasitas kinerja operasional unit penangkapan ikan, meningkatkan daya jangkauan melaut, bertambahnya upaya penangkapan (jumlah trip) dan hasil tangkapan menjadi meningkat.

Pada umumnya jenis teknologi penangkapan ikan yang digunakan nelayan Kabupaten Halmahera Utara adalah pancing ulur, rawai, *mini purse seine* (pajeko), jaring insang hanyut dan tetap (*gillnet*), jaring lingkaran (*giob*), huhate, bagan dan bubu. Untuk jenis kapal/perahu penangkapan ikan yang digunakan adalah perahu tanpa motor/perahu layar dan perahu motor tempel dengan ukuran dibawah 5 GT (tergolong skala kecil) dengan teknologi yang masih sederhana.

Hanya jenis pajeko yang tingkat teknologinya relatif paling maju dan itupun jumlahnya masih terbatas.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara, 2008.

Gambar 3 Perkembangan jumlah unit penangkapan ikan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara dari 2004-2008

Program PEMP diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan laut. Salah satu manfaat langsung yang diperoleh kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) adalah pengembangan teknologi usaha perikanan baik yang sudah ada maupun yang baru. Pengembangan teknologi program PEMP didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan nelayan, ketersediaan DEP-PEMP serta hasil musyawarah KMP. Sejak tahun 2004-2008, jumlah alat tangkap di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan trend (kecenderungan) terus meningkat, seperti tersaji pada Gambar 3.

3.1.3 Ekonomi masyarakat pesisir

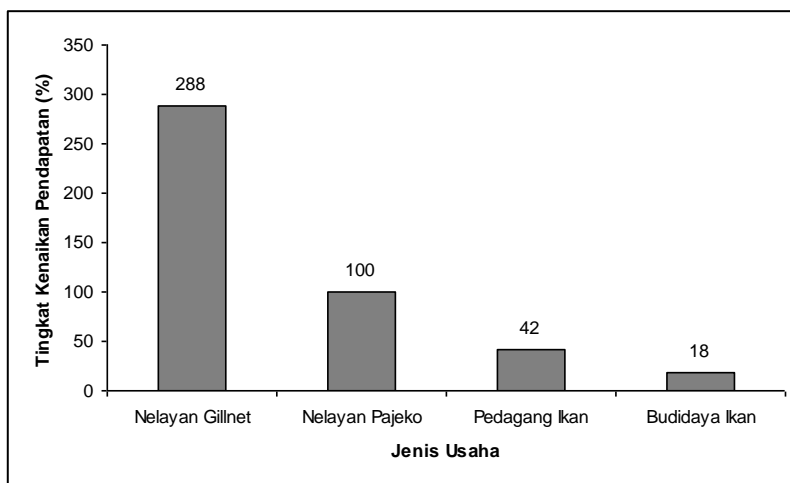
Kondisi ekonomi masyarakat pesisir dijelaskan melalui variabel ekonomi harga ikan, akses pasar, dan tingkat pendapatan. Harga ikan dilokasi penelitian cenderung rendah. Hal ini disebabkan tempat Pelelangan ikan (TPI) masih belum berfungsi, sehingga nelayan tidak memiliki alteratif lain menjual ikannya selain kepada pedagang pengumpul ikan (dibo-dibo). Oleh karena itu, harga ikan lebih

dominan ditentukan dibo-dibo, sehingga harga ikan menjadi rendah. Bahkan harga semua jenis ikan dipukul rata sama, tidak dibedakan jenisnya sedangkan dipasaran harga setiap jenis ikan berbeda, seperti cakalang dengan tongkol beda harganya.

Sistem pemasaran ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih relatif sederhana, sehingga masih perlu dikembangkan dan dimodifikasi. Mekanisme pemasaran ikan adalah nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengumpul (dibo-dibo) dan sekaligus pedagang eceran. Pedagang ini melakukan pembelian dari nelayan secara langsung. Kemudian, pedagang tersebut memasarkannya ke pasar tradisional atau ke daerah lain yang berdekatan.

Setelah program PEMP dari segi pendapatan, nelayan mengalami peningkatan signifikan sebesar 100 hingga 288%, pedagang ikan sebesar 42% dan pembudidaya ikan sebesar 18% (Gambar 4). Berdasarkan uji *wilcoxon signed rank test* pada taraf kesalahan $<5\%$, menunjukkan program PEMP secara nyata berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan *gillnet*, nelayan pajeko, dan pedagang ikan (Tabel 1). Sedangkan untuk peningkatan pendapatan pedagang ikan masih belum nyata. Hal ini disebabkan jumlah responden yang masih sedikit (2 orang) dan usaha ini masih dalam taraf merintis (ujicoba).

Selain peningkatan pendapatan, program PEMP telah mendorong mobilitas vertikal nelayan, yaitu dari status buruh berubah menjadi nelayan pemilik unit penangkapan ikan (pengusaha) di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Satria 2001).



Gambar 3 Prosentase pertambahan pendapatan responden setelah Program PEMP

Tabel 1 Dampak Program PEMP terhadap pendapatan nelayan berdasarkan uji *wilcoxon signed rank test*

Nelayan	Keadaan	Responden	Test Statistik	
		Jumlah	Asymp. Sig. (2-tailed)	Z
<i>Gillnet</i> *	a. Menurun	0 ^a	0.002 < 0,05	-3.066 ^a
	b. Meningkatkan	12 ^b		
	c. Tetap	0 ^c		
	Total	12		
Pajeko*	a. Menurun	0 ^a	0.027 < 0,05	-2.207 ^a
	b. Meningkatkan	6 ^b		
	c. Tetap	0 ^c		
	Total	6		
<i>Pedagang Ikan</i> *	a. Menurun	0 ^a	0.005 < 0,05	-2.807 ^a
	b. Meningkatkan	10 ^b		
	c. Tetap	0 ^c		
	Total	10		
<i>Budidaya Ikan</i>	a. Menurun	0 ^a	0.180 > 0,05	-1.342 ^a
	b. Meningkatkan	2 ^b		
	c. Tetap	0 ^c		
	Total	2		

Keterangan: *Nyata pada taraf kesalahan < 5%

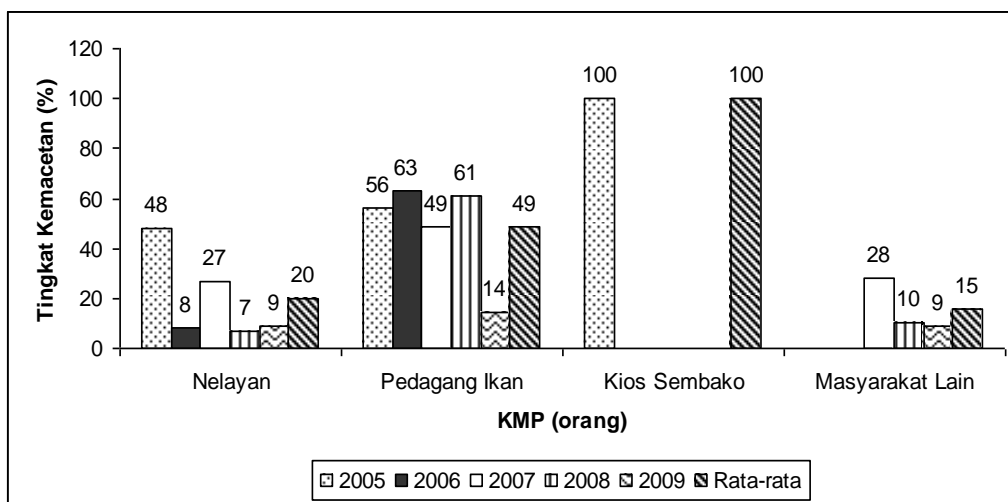
3.2 Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Program PEMP telah mendorong aksi solidaritas dan kolektifitas masyarakat pesisir dengan terbentuknya Koperasi LEPP-M3 di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara. Lembaga koperasi ini mulai tumbuh dan berkembang, serta telah mampu menghidupi operasionalnya secara mandiri. Sasaran pemberdayaan Koperasi LEPP-M3 adalah nelayan, pedagang ikan, pembudidaya ikan dan usaha mikro masyarakat pesisir lainnya. Sampai akhir tahun 2009, keanggotaan LEPP-M3 mencapai 553 orang yang tersebar di desa-desa pesisir yang tercakup dalam 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

Lembaga Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak peronominan di kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara. Namun sampai sekarang lembaga ini masih berperan sebatas pengelolaan dana DEP-PEMP dengan kinerja masih belum optimal. Hal ini dilihat dari masih tingginya tingkat kemacetan pengembalian DEP-PEMP dari KMP. Pada tahun 2005, kemacetan tertinggi dilakukan oleh KMP Kios Sembako (100%), diikuti pedagang ikan (56%) dan nelayan (48%). Pada tahun 2006, 2007 dan 2008, kemacetan tertinggi dilakukan

oleh KMP pedagang ikan (63%, 49% dan 61%). Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kemacetan tertinggi dilakukan oleh KMP Kios Sembako (100%), pedagang ikan (49%), nelayan (20%) dan masyarakat lain (15%) (Gambar 4).

Selain itu, lembaga ini belum dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan. Peran yang seharusnya dijalankan belum sepenuhnya dijalankan, seperti minimnya pendampingan dan pembinaan terhadap KMP dan KUB dan belum bisa membuka akses pemasaran dan permodalan yang menjadi persoalan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara.



Gambar 4 Tingkat kemacetan DEP-PEMP dari tahun 2005 hingga 2009.
Sumber: Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara

3.3 Perumusan Strategi Perbaikan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Hasil evaluasi internal dan eksternal usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang, disamping kendala sebagai kelemahan dan ancaman. Kekuatannya, yaitu 1) tenaga kerja cukup tersedia; 2) usia potensial; 3) tingkat pendidikan dan 4) motivasi/ketekunan masyarakat pesisir. Peluangnya, yaitu 1) potensi SDI; 2) kesempatan kerja di bidang perikanan; 3) keberadaan koperasi LEPP-M3; dan 4) dukungan pemerintah daerah. Sedangkan kelemahannya, yaitu 1) teknologi masih sederhana; 2) keterbatasan akses permodalan; 3) keterbatasan akses pemasaran; 4) belum berperannya kelompok masyarakat pesisir; dan 5) keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan. Ancamannya, yaitu 1) harga ikan rendah; 2) harga BBM tinggi; 3) Cuaca dan musim yang buruk; dan 4) *Illegal fishing*.

Untuk merumuskan perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir digunakan hasil penilaian faktor internal dan faktor eksternal yaitu mengembangkan kekuatan-peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan-ancaman yang dihadapi. Berdasarkan penilaian faktor internal dan eksternal dirumuskan alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menggunakan analisis matriks SWOT, seperti disajikan pada Tabel 2.

Hasil analisis SWOT telah dirumuskan enam alternatif perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:

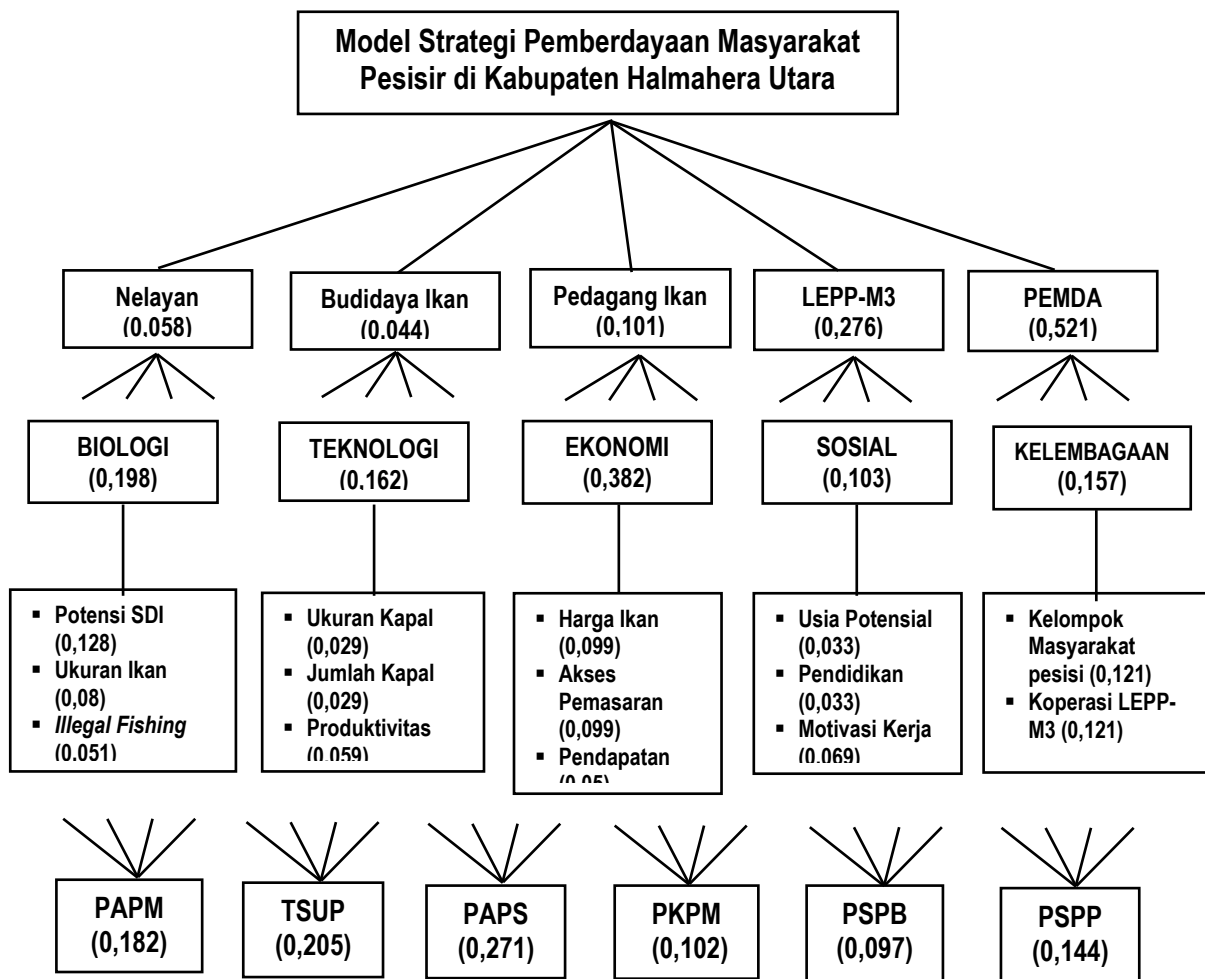
- 1) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan.
- 2) Pengembangan akses permodalan.
- 3) Pengembangan akses pemasaran.
- 4) Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (KMP, KUB hingga LEPP-M3).
- 5) Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan.
- 6) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Tabel 2 Matriks SWOT peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Halmahera Utara

	<u>Kekuatan (Strengths)</u>	<u>Kelemahan (Weakness)</u>
Internal Faktor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja cukup tersedia (S1) ▪ Usia potensial masyarakat pesisir (S2) ▪ Tingkat pendidikan masyarakat pesisir (S3) ▪ Ketekunan/motivasi masyarakat pesisir (S4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi usaha perikanan masih sederhana (W1) ▪ Lemahnya permodalan usaha perikanan (W2) ▪ Akses pemasaran terbatas (W3) ▪ Kelompok masyarakat pesisir (W4) ▪ Keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan (W5)
Eksternal Faktor		
<u>Peluang (Opportunities)</u>	<u>Strategi SO :</u>	<u>Strategi WO :</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi SDI belum dimanfaatkan optimal (O1) ▪ Peluang kesempatan kerja di bidang perikanan (O2) ▪ Koperasi LEPP-M3 (O3) ▪ Dukungan kebijakan pemerintah daerah (O4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan (S1 s/d S4, O1 s/d O4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan (W1, W2, O3, O4) ▪ Pengembangan akses permodalan (W2, O3) ▪ Pengembangan akses pemasaran (W3, O4) ▪ Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (W4, O3) ▪ Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan (W5, O4)
<u>Ancaman (Threats)</u>	<u>Strategi ST :</u>	<u>Strategi WT :</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga ikan rendah (T1) ▪ Harga BBM tinggi (T2) ▪ Cuaca dan musim buruk (T3) ▪ Kegiatan penangkapan ikan bersifat merusak dan IUU (T4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (S3, S4, T3, T4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan akses pemasaran (W3, T1) ▪ Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan (W1, W5, T2, T3) ▪ Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (W4, T4)

3.4 Penentuan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh enam strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya melalui analisis AHP, diperoleh urutan prioritas strategi, yaitu 1) pengembangan akses pemasaran; 2) pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan; 3) pengembangan akses permodalan; 4) pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan; 5) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; dan 6) pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (Gambar 5).



Keterangan Alternatif Model Strategi:

- PAMP : pengembangan akses permodalan
- TSUP : pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan
- PAPS : pengembangan akses pemasaran
- PKPM : penguatan kelembagaan masyarakat pesisir
- PSPB : pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat
- PSPP : pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan

Gambar 5 Hirarki dan nilai prioritas model pemberdayaan masyarakat pesisir

3.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis implikasi program PEMP terhadap aspek sumberdaya perikanan, sosial-budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara diperoleh potensi, kekuatan, kelemahan dan ancaman program PEMP. Potensi dan kekuatan harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang menjadi faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, untuk memperbaiki program pemberdayaan dilakukan analisis SWOT. Sedangkan penentuan strategi program pemberdayaan digunakan AHP.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan AHP diperoleh rumusan dan urutan prioritas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Prioritas ke-1, pengembangan akses permodalan.
- 2) Prioritas ke-2, pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan
- 3) Prioritas ke-3, pengembangan akses pemasaran.
- 4) Prioritas ke-4, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir.
- 5) Prioritas ke-5, pengolahan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.
- 6) Prioritas ke-6, pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan.

1) Pengembangan akses permodalan

Prioritas pertama strategi pemberdayaan masyarakat nelayan adalah pengembangan akses permodalan. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini permasalahan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan adalah kesulitan memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Sifat usaha perikanan yang musiman, resiko tinggi (penuh ketidakpastian) sering menjadi alasan keengganan pihak bank menyediakan modal bagi usaha perikanan, apalagi tidak ada anggunan pinjaman.

Dengan memperhatikan kesulitan akses permodalan tersebut, maka salah satu alternatifnya adalah mengembangkan mekanisme pendanaan sendiri (*self financing mechanism*). Bentuk dari sistem ini adalah pengembangan lembaga

mikro dan kedepannya diharapkan dapat tumbuh menjadi makro, yang dikhususkan untuk mendukung permodalan usaha di bidang perikanan. Hal ini telah diinisiasi pada program PEMP melalui pembentukan Koperasi LEPP-M3 (Nikijuluw 2001).

Koperasi LEPP-M3 adalah aplikasi dari modifikasi *grameen bank* pada masyarakat pesisir. Koperasi LEPP-M3 di Halmahera Utara telah mampu membiayai operasional secara mandiri. Namun peran lembaga ini masih berkutat dalam pengelolaan perguliran DEP-PEMP dengan kinerja yang belum optimal. Ke depan lembaga ini diharapkan dapat berkembang dan memainkan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat pesisir sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian di kawasan pesisir. Sehingga peran lembaga ini menjadi lebih luas sebagai *holding company*. KMP dan KUB perlu menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam membuka akses permodalan/investasi, akses pemasaran dan pengembangan teknologi usaha perikanan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan koperasi LEPP-M3 perlu penguatan kapasitas kelembagaan dari berbagai instansi terkait, baik penguatan dari segi struktur organisasi, sumberdaya pengurusan, operasional dan infrastrukturnya.

2) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan

Strategi prioritas kedua adalah pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. Teknologi yang digunakan nelayan di Halmahera Utara, pada umumnya masih sederhana. Karena itu produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan menjadi rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar implemetasi teknologi dapat berkelanjutan.

Strategi pemberian bantuan unit penangkapan ikan seperti *gillnet* dan pajeko di program PEMP telah terbukti dapat meningkatkan pendapat nelayan. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan melalui pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang modernisasi alat dan kapal penangkapan ikan menyatakan bahwa modernisasi tersebut harus dibarengi dengan peran institusi pemerintah dalam pengelolaan perikanan bagi perikanan skala kecil, karena kondisi yang tidak dipantau akan mengakibatkan penurunan stok sumberdaya (Allison dan Ellis 2001), terutama diperairan territorial.

3) Pengembangan akses pemasaran

Prioritas ketiga strategi pemberdayaan masyarakat pesisir adalah pengembangan akses pemasaran. Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Pasar bisa menjadi kendala utama usaha bila tidak berkembang. Karena itu, membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan, bila tidak ada pasar, maka akan menghambat perkembangan usaha masyarakat pesisir.

Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Halmahera Utara cukup terisolir jauh dari ibukota provinsi Maluku Utara, terbukanya peluang pemasaran merupakan faktor utama supaya kegiatan perikanan dapat berkembang. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Halmahera Utara mengalami kesulitan pemasaran dan hanya tergantung pada pedagang pengumpul (dipo-dipo). Hal ini disebabkan TPI yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar dengan sehat tidak berfungsi. Struktur pasar tidak menguntungkan masyarakat, ini disebabkan karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas serta kontinuitas produk. Menurut Bogar (2009) pada sistem pemasaran ikan nelayan skala kecil lebih didominasi pedagang pengumpul dan yang paling dominan menentukan harga ikan adalah pedagang pengumpul. Bahkan pada waktu hasil tangkapan nelayan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu membelinya. Kondisi tersebut, sangat merugikan pihak nelayan.

Aspek pemasaran belum tersentuh oleh program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara, maka program pemberdayaan masyarakat dimasa datang perlu mengedepankan aspek pemasaran ini. Untuk membuka akses pemasaran bagi produk-produk usaha perikanan, maka diupayakan dengan memfasilitasi atau mendekatkan masyarakat pesisir dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga eksportir komoditas perikanan. Untuk itu peran lembaga masyarakat (LEPP-M3) sebagai wakil masyarakat dan instansi terkait wakil pemerintah diharapkan dapat aktif memfasilitasi kerjasama penjualan produk-produk perikanan dengan perusahaan-perusahaan eksportir tersebut. Keuntungan dari hubungan kerjasama seperti ini, masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan masyarakat terutama dalam hal meningkatkan kinerja produksi dan kualitas produk, serta mendapatkan penguatan modal bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir.

4) Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir

Program PEMP telah dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 dan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga periode, yaitu 1) periode inisiasi (2001-2003), 2) periode institusionalisasi (2004-2006), dan 3) periode diversifikasi (2007-2009). Periode inisiasi merupakan periode membangun, memotivasi dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan kelembagaan ekonomi (LEPP-M3) yang dibangun untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat pesisir. Berikutnya periode institusional merupakan periode yang ditandai dengan upaya pengembangan dan penguatan LEPP-M3. Terakhir periode diversifikasi merupakan periode perluasan unit usaha koperasi LEPP-M3 (Kusnadi 2009).

Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara dimulai dari tahap inisiasi, yaitu tahap pengenalan program kepada masyarakat pesisir dan pemerintah daerah, serta pembentukan kelompok di tingkat masyarakat seperti KMP, KUB, UPK dan LEPP-M3. Pada tahun 2006 memasuki tahap institusional dengan menjadikan LEPP-M3 berbadan hukum koperasi dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat. Pada tahun 2007 hingga 2008 periode diversifikasi, LEPP-M3 tidak hanya mengelola DEP-PEMP saja tetapi mulai mengembangkan usahanya, seperti membangun unit usaha kedai pesisir.

Elemen strategi keempat pemberdayaan masyarakat nelayan adalah penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Program PEMP mulai tahap inisiasi dan institusional telah berupaya membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) dan kelompok usaha bersama (KUB) ditingkat desa serta membangun koperasi LEPP-M3 ditingkat kawasan pesisir. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri.

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut, tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi kelompok masyarakat pesisir yang baru terbentuk dan memiliki berbagai keterbatasan. Penekanan terhadap penguatan kelompok masyarakat dan koperasi LEPP-M3 ini, didasarkan pada kelemahan aspek ini pada pasca program PEMP yang kurang mendapat perhatian serius. Kelompok-kelompok di tingkat desa tersebut cenderung diabaikan. Oleh karena itu, untuk menumbuh kembangkan tatanan kelembagaan masyarakat pesisir tersebut perlu penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis dan terus menerus. Dengan penguatan kelompok nelayan akan mempermudah mereka untuk mengakses sumberdaya yang dibutuhkan dan memiliki posisi tawar atau setara dengan pihak lain yang terlibat di dalam setiap aktivitas atau berhubungan dengan mereka. Begitu pula penguatan LEPP-M3 diharapkan lembaga ini dapat berdaya dan memainkan peran dan fungsinya sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi di tingkat kawasan pesisir. Bentuk penguatan kelembagaan masyarakat ini dapat berupa pembinaan, pendampingan dan pelatihan dari berbagai instansi terkait.

Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat ini merupakan bagian dari peran pemerintah dari *co-manajemen* dalam memberikan pelayanan bagi peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, serta manajemen usaha perikanan. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal sosial masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakkan aktivitas perekonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi *trigger* (pemicu) tumbuh kembangnya inovasi usaha perikanan sehingga tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah semata, tetapi

potensi sosial ekonomi yang ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan secara berkelanjutan.

5) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat

Prioritas strategi kelima adalah pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diakomodasi dalam manajemen perikanan partisipatori. Manajemen ini dapat berupa manajemen berbasis masyarakat yang menurut Pomeroy dan Williams (1999) sebagai suatu elemen sentral dari ko-manajemen. Manajemen berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sangat penting, mengingat tujuan dari pengelolaan adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, integritas kultural, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan sistem pendukung lainnya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan memberikan manfaat, yaitu 1) penyerapan tenaga kerja, peningkatan wawasan dan pengetahuan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan; 2) masyarakat juga akan menjaga kelestarian dan kelangsungan sumberdaya alam yang merupakan aset mereka dalam melakukan kegiatan usaha perikanan, jika sumberdaya alam rusak akan berdampak terganggunya aktivitas usaha mereka; dan 3) *integritas cultural* masyarakat akan terjaga, jika hal ini tidak diperlihatkan maka akan timbul permasalahan yang baru lagi.

Untuk itu, pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal dielaborasi dengan pendekatan konsep ko-manajemen. Ko-manajemen adalah konsep manajemen pengelolaan bersama, artinya pelbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) setuju saling berbagai peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil dan merata (Nikijuluw 2002). Melalui proses ko-manajemen ini, diharapkan agar terbangun proses koordinasi yang kuat dan harmonis antara *stakeholders* (masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha/swasta dan pemerintah) sehingga mampu untuk mengakomodasikan pelbagai kepentingan yang ada di kawasan sumberdaya

perikanan tersebut. Proses mekanisme pembagian peran, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dapat diformulasikan secara bersama antara *stakeholders*. Dengan pembagian peran secara proposional dan professional, diharapkan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Halmahera Utara akan lebih efektif, efisien dan adil, sehingga nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

6) Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan

Prioritas strategi keenam adalah pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan. Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/bisnis. Ketersediaan sarana prasarana pendukung tersebut sangat mempengaruhi berkembangnya usaha perikanan. Alternatif strategi kebijakan ini merupakan solusi terhadap masih minimnya sarana prasarana penunjang usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara, seperti dermaga standar belum memadai, TPI dan pabrik es tidak berfungsi, langkanya BBM, terbatasnya energi listrik serta keterbatasan prasarana jalan untuk membawa produksi perikanan ke pasar. Kondisi tersebut telah menyebabkan tingginya biaya operasional, kualitas rendah karena keterbatasan es batu dan akhirnya harga ikan menjadi rendah. Semua permasalahan tersebut telah menyebabkan terganggunya aktivitas usaha perikanan sehingga pada akhirnya berujung pada penurunan pendapatan nelayan.

Atas dasar kenyataan itu, pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan nelayan, perlu memprioritaskan pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan sebagaimana tertuang dalam rencana strategi tahun 2009. Beberapa hal perlu dilakukan pemerintah daerah, diantaranya yaitu segera dilakukan pembangunan fisik *cold storage*, memfungsikan TPI dan pabrik es di tempat-tempat yang masih mengalami kekurangan sarana prasarana tersebut. Pembangunan *cold storage* dan pabrik es di dekat sentra-sentra usaha perikanan tangkap dapat menunjang meningkatkan kualitas produksi ikan, jika mutu ikan baik maka akan meningkatkan harga ikan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.

Strategi terakhir adalah pengembangan diversifikasi pengolahan ikan. Pengolahan ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih rendah, baru ada pengasapan ikan dan pengeringan ikan teri. Kegiatan pengolahan pengasapan ini masih skala kecil dan beroperasi bila ada permintaan dari pasar lokal sehingga tidak berjalan secara terus menerus. Kegiatan pengeringan ikan teri juga tergantung pasokan bahan baku di Kabupaten Morotai, jika pasokan bahan baku tidak ada maka kegiatan pengolahan ikan ini ikut juga berhenti.

Strategi pengembangan pengolahan ikan ini perlu terus ditingkatkan sebagai nilai tambah bagi pengasapan masyarakat pesisir dan daya serap dari hasil tangkapan nelayan. Dengan perkembangan teknologi dan armada penangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara di masa depan tentunya perlu penyerapan hasil tangkapan baik dalam bentuk ikan segar dan bahan baku pengolahan ikan. Selain itu, pengembangan diversifikasi pengolahan ikan ini akan memiliki dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir. Namun demikian, untuk pengembangan strategi ini perlu didukung oleh berbagai instansi terkait berupa pembinaan, pelatihan, pemberian modal dan akses pasar.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- 1) Program PEMP di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah berkontribusi memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir. Program PEMP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan terjadinya mobilitas vertikal nelayan dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit penangkapan (pengusaha).
- 2) Masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang, disamping kendala sebagai kelemahan dan ancaman. Kekuatannya, yaitu: tenaga kerja cukup tersedia, usia potensial, tingkat pendidikan dan ketekunan/motivasi; peluangnya, yaitu: potensi SDI, kesempatan kerja di bidang perikanan terbuka, keberadaan

koperasi LEPP-M3 dan dukungan pemerintah daerah; kelemahannya, yaitu: keterbatasan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, tidak berkembangnya kelompok masyarakat pesisir dan keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan; dan ancamannya, yaitu: harga ikan rendah, harga BBM tinggi, cuaca dan musim yang buruk; dan *illegal fishing*.

- 3) Prioritas strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera, yaitu 1) pengembangan akses pemasaran; 2) pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan; 3) pengembangan akses permodalan; 4) pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan; 5) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; dan 6) pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

4.2 Saran

- 1) Akses pemasaran merupakan kendala serius dalam pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara. Keterbatasan akses pasar ini telah berdampak pada harga ikan yang rendah. Bahkan pada saat musim ikan, para pedagang ikan tidak sanggup menampung hasil tangkapan nelayan. Dampaknya masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara tidak tertarik dalam usaha perikanan, lebih cenderung ke usaha perkebunan atau buruh pelabuhan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah sudah saatnya melakukan upaya-upaya untuk membuka akses pemasaran, seperti temu bisnis dan investasi perikanan, promosi dan sosialisasi melalui media masa, internet dan media komunikasi lainnya.
- 2) Program PEMP merupakan program nasional, tentunya dalam implementasi di daerah menghadapi kendala aspek lokalitas dan tipologi. Ke depan program ini perlu mengakomodasi inisiatif-inisiatif bersifat lokalitas, agar dalam transformasi nilai-nilai pemberdayaan pada nelayan setempat dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
- 3) Implementasi pengembangan unit penangkapan pajeko (*mini pure seine*) berdampak positif terhadap pendapatan nelayan, namun program modernisasi alat tangkap yang tidak terencana di beberapa daerah di Indonesia telah berdampak negatif, seperti terjadinya kerusakan sumberdaya dan *overfishing*.

Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi dalam program modernisasi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai kapasitas perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara.

- 4) Model PEMP mengedepankan pendekatan kelembagaan sosial, tetapi justru aspek kelembagaan menjadi kelemahan program di Kabupaten Halmahera Utara. Kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk di desa-desa pesisir dan Koperasi LEPP-M3 kurang mendapat perhatian pasca program, sehingga lembaga-lembaga masyarakat tersebut sulit untuk mandiri. Atas dasar itu, perlu program untuk penguatan kapasitas kelembagaan tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Edward H and Ellis F. 2001. The livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries. *Marine Policy Journal* 25:377-388.
- Arikunto S. 2000. *Manajemen Penelitian, Edisi Baru*. Jakarta: Rieneka Cipta. 645 hlm.
- Dault A. 2008. *Pemuda Dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 222 hlm.
- Kusnadi. 2009. *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.
- Lind DA, WG Marchal, SA Wethen. 2007. *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kleompok Data Global*. Edisi ke-13. Jakarta: Salemba Empat. 502 Hlm.
- Nikijuluw PHV. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir. Bogor. *Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan PKSPL*: 16 hlm.
- Nikijuluw PHV. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: P3R*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 254 hlm.
- Nurani TW. 2003. Proses Hierarki Analitik (analytical Hierachy Process) Suatu Metoda untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan *dalam* Darmawan dan Novita, Editor. *Konsep Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan di Indonesia*. Bogor: Departemen

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, halaman 73-98..

Pomeroy RS and MJ Williams. 1999. Fisheries Co-management and Small-scale Fisheries: A Policy Brief. Fisheries Co-management Project. Manila, Philippines. *ICLARM (International Center for Living Aquatic Resource Management) Journal*: 15 p.

Rangkuti R. 2002. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 188 hlm.

Satria A. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press. 153 hlm.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Ed ke-2. Bandung: Alfabeta. 306 hlm.